



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA MANDALA”
JL. RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI
TELP. 0361-419888 KODE POS 80351



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit / Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri.

Visi dan misi yang dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat dipertanggung jawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK) maupun Pengukuran Kinerja.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2020 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Mangupura, 15 Januari 2021
Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Badung,

I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, S.Sos.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750207199311 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Ringkasan Eksekutif	vi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Dinas , Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	3
1.4 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan	5
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	8
2.1 Rencana Strategis	8
2.2 Indikator Kinerja Utama	12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	14
2.4 Cascading Tahun 2020	16
BAB III Akuntabilitas Kinerja	17
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	18
3.2 Analisis Capaian Kinerja	21
3.3 Akuntabilitas Keuangan	41
BAB IV Penutup	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	45

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Grafik 1.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	7
Grafik 3.1	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Prosentase Jenis Layanan Publik Berbasis TIK	23
Grafik 3.2	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Prosentase Kelompok Komunikasi Informasi Masyarakat Yang Terbentuk dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	31
Grafik 3.3	Target dan Realisasi Indikator Jumlah Dokumen Statistik Kabupaten Badung yang dipublikasikan tepat waktu	37
Grafik 3.4	Prosentase Informasi Daerah yang Terjaga Kerahasiaan dan Keamanannya Sesuai Perundang-undangan	40
Grafik 3.5	Target dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	41

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	10
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	11
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	13
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2020	15
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2020	19
Tabel 3.2 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Secara Efektif	22
Tabel 3.3 Target Jumlah Layanan Publik Berbasis TIK	24
Tabel 3.4 Pengembangan Akses Point pada lokasi-lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet Tahun 2019-2020	26
Tabel 3.5 Pengembangan Lokasi dan Jumlah Kamera CCTV dari Tahun 2017-2020	28
Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	29
Tabel 3.7 Desa/Kelurahan di Kecamatan yang telah membentuk KIM tahun 2017 s/d 2020.....	32
Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Terpublikasikannya Dokumen Statistik Kabupaten Badung Yang Akurat dan Transparan	35
Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Tatakelola Persandian Untuk Menjaga Kerahasiaan Serta Keamanan Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	38
Tabel 3.10 Alokasi Anggaran Dan Realisasi Program Serta Kegiatan Pendukung Capaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2020	42

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan paradigma baru di era reformasi ini bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu Dinas / Instansi harus dipertanggung jawabkan secara transparan kepada masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sebagai salah satu instansi teknis dibawah Pemerintah Kabupaten Badung melalui LKjIP melaporkan kepada atasan langsung yaitu Bupati Badung.

Secara singkat Laporan ini berisi tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung menyangkut urusan komunikasi dan informatika yang ditunjukkan dengan beberapa tabel antara lain : Rencana Strategik Tahun 2017 - 2021 (tabel RS), Rencana Kerja Tahunan (Tabel RKT) Tahun 2020, Dokumen Perjanjian Kinerja (Dokumen PK) Tahun 2020 dan Pengukuran Kinerja tahun 2020.

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 3 (tiga) urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian. Untuk mengukur capaian kinerjanya ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator sebagai alat ukurnya, 4 (empat) indikator diantaranya merupakan indikator pendukung 3 (tiga) misi Pemerintah Kabupaten Badung yaitu misi kedua, kedelapan dan kesembilan.

Capaian kinerja sasaran 1 yaitu semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif dengan alat ukur 3 (tiga) indikator yaitu Prosentase jenis pelayanan publik yang berbasis TIK capaian kinerjanya 100% dengan demikian target 91,6 % (66 jenis pelayanan publik) sudah terealisasi, dengan serapan anggaran sebesar Rp 12.571.671.584,-.

Alat ukur kedua dengan indikator Prosentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet capaian kinerjanya sebesar 98,2% dengan demikian dari 1006 lokasi yang ditargetkan terkoneksi jaringan intranet/internet sebanyak 988 lokasi terealisasi tahun 2018. Pada tahun 2020 lebih memprioritaskan pada penambahan akses point pada lokasi lokasi tersebut dengan tujuan meningkatkan kekuatan sinyal dan meningkatkan jangkauan wifi nya, dengan target 518 akses poin dan realisasi sebesar 534 akses poin, sehingga total sampai dengan tahun 2020 sebanyak 1635 akses poin pada 988 lokasi. Serapan anggaran sebesar Rp 44.387.683.920,01.

Alat ukur ketiga yaitu indikator jumlah kamera CCTV yang terpasang pada tempat – tempat strategis capaian kinerjanya 98,63 %. Target sampai dengan tahun 2021 sebesar 656 kamera CCTV, namun samapai tahun 2020 terealisasi sebanyak 647 kamera CCTV terpasang di tempat tempat strategis di Kabupaten Badung, ketidak tercapaian di target pada tahun 2020 disebabkan karena ada pengurangan terhadap belanja modal akibat dari pandemi covid-19 sehingga memprioritaskan pada pemeliharaan kamera yang sudah terpasang sehingga berfungsi secara optimal. Dengan serapan anggaran sebesar Rp 948.603.005,-

Capaian Kinerja Sasaran ke 2 yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 185,71 % dengan alat ukur satu indikator yaitu Prosentase Kelompok Informasi Masyarakat yang terbentuk dengan pemanfaatan teknologi. Target tahun 2020 sebesar 87,5 % terealisasi sebesar 162,50 % (tersedia 339 Kelompok KIM) peningkatan yang sangat signifikan ini disebabkan karena adanya perubahan yang menjadi dasar pembentukan KKIM yang pada awalnya berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/11 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang

Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota. Dengan adanya Surat Edaran Bupati Badung Nomor 411.6/758/DISKOMINFO/SEKRET yang mengacu pada Permen Kominfo Nomor 8/Per/M/Kominfo/6/2010 yang mengakibatkan perubahan atas target pembentukan KKIM yang semula hanya dibentuk minimal 50% dari jumlah Kecamatan menjadi pembentukan KIM di setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung, serapan anggaran sebesar Rp 12.930.300,-.

Sasaran yang menyangkut urusan Statistik adalah sasaran 3 yaitu Terpublikasikannya dokumen statistik Kabupaten Badung dengan alat ukur jumlah dokumen statistik yang dipublikasikan tepat waktu. Capaian kinerja sasaran 3 tidak tercapai dengan target indikator 750 dokumen statistik dipublikasikan tepat waktu tidak terealisasi, yang disebabkan adanya rasionalisasi anggaran pada belanja penggandaan dokumen, namun 227 data yang ditargetkan pada DPA tahun 2020 semua terrealisasi pada 3 jenis dokumen (Badung dalam angka, Kecamatan dalam angka dan PDRB) dalam bentuk soft copy yang dipublikasikan lewat website PPID Kabupaten Badung (ppid.badungkab.go.id) dengan serapan anggaran sebesar Rp 8.326.300,- .

Urusan Persandian menetapkan satu sasaran yang merupakan sasaran ke 4 yaitu Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan satu indikator sebagai alat ukurnya yaitu Prosentase Informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang – undangan. Adapun capaian kinerja sasaran 4 sebesar 50 %, dengan capaian kinerja dari indikator sebesar 50 %. capaian tidak sesuai target disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran akibat pandemi covid-19. Serapan anggaran sebesar Rp. 52.157.000,- .

Selanjutnya pencapaian sasaran mencakup 6 indikator kinerja utama diketahui memperoleh nilai 125,35 yang berarti sangat baik dengan serapan anggaran sebesar 98,76%.

Beritik tolak dari Data yang dicapai, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas , Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung urusan Komunikasi dan informatika memiliki tingkat keberhasilan sesuai dengan harapan, walaupun ada beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian lebih untuk keberhasilannya dimasa-masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan salah satu teknologi yang berkembang pesat. Pesatnya perkembangan TIK akan membuka peluang dan tantangan untuk menciptakan, mengakses, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara tepat dan akurat. Informasi merupakan suatu komoditi yang sangat berharga di era globalisasi untuk dikuasai dalam rangka meningkatkan daya saing suatu organisasi (termasuk Pemerintah Daerah) secara berkelanjutan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah republik Indonesia telah membuat kebijakan untuk memanfaatkan TIK untuk membangun Electronic Government for good Good Governance yang terintegrasi mulai dari tingkat pemerintahan daerah hingga ke pusat. Tujuannya adalah agar infrastruktur TIK yang dibangun dapat dimanfaatkan secara bersama untuk berkoordinasi oleh seluruh instansi.

Dengan adanya susunan organisasi dan tata Kerja (STOK) baru yang mengacu pada undang – undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah serta Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta ditetapkannya Peraturan Bupati Badung No. 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah, maka bulan Januari 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung terbentuk yang sebelumnya bergabung dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yaitu Dinas , komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

Salah satu amanah dari Dinas Komunikasi dan informatika adalah mengintegrasikan sistem menuju smart city dengan melakukan sinergitas dalam tata kelola informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika fokus pada ekosistem TIK smart city yang artinya Dinas Kominfo tidak hanya mengambil data – data internal pemerintahan ataupun dinas – dinas tapi juga mempunyai kewajiban untuk mengintegrasikan layanan yang diluar pemerintahan. Pembangunan komunikasi dan informatika merupakan gabungan antara pengembangan infrastruktur memadai dan

tersedianya layanan komunikasi dan informasi yang merata di semua wilayah tidak terkecuali di pedesaan.

Dengan demikian sebagai Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung wajib untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Badung.

2. Tujuan :

- a) Memberikan informasi mengenai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung selama Tahun Anggaran 2020;
- b) Bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Badung untuk perbaikan di tahun – tahun berikutnya.
- c) Menyatakan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungannya.
- d) Dorongan terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintah yang baik dan terpercaya.

1.3 Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dimana dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan dengan pembangunan dan pengembangan system Informasi, pengembangan dan pemeliharaan jaringan intranet/internet, pengelolaan informasi dan publikasi, penyampaian data statistik serta pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi.

Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP. No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perda Kabupaten Badung Nomor 20 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Badung no 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, pada bulan Januari tahun 2017 Dinas komunikasi dan Informatika terbentuk sebagai OPD baru yang dalam tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tiga urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

Aspek strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah perkembangan teknologi informasi dalam membangun pemerintahan berbasis e-gov menjadikan tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan informasi dan komunikasi yang terpadu, efektif dan efisien.

Adapun isu – isu strategis yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung antara lain:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih di masing – masing OPD untuk pelaksanaan e – gov di Kabupaten Badung.
2. Optimalisasi keamanan dan kenyamanan masyarakat dan wisatawan Kabupaten Badung sebagai daerah destinasi pariwisata internasional yang merupakan potensi peningkatan PAD Kabupaten Badung.
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk mewujudkan Kabupaten Badung menuju smart city.

4. Optimalisasi data informasi daerah untuk tujuan publikasi yang jelas dan transparan.
5. Optimalisasi tata kelola persandian untuk tujuan keamanan dan kerahasiaan informasi daerah.

- **URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Urusan Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu urusan yang pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang mendukung penerapan Pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT) atau e - Government. Melalui urusan Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung membangun infrastruktur jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung yang merupakan sekumpulan komponen fisik dan logikal yang menyediakan dasar untuk konektivitas keamanan, routing, pengaturan, akses dan fitur integral pada jaringan yang merupakan dasar dalam pelaksanaan pemerintahan berbasis teknologi informasi, dengan demikian penerapan konsep smart city dapat diterapkan di Kabupaten Badung serta keterbukaan informasi publik bisa lebih cepat, tepat dan transparan. Selain hal tersebut melalui urusan kominfo Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Badung membentuk Kelompok Komunikasi dan Informasi Masyarakat (KKIM) sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat melalui informasi.

- **URUSAN STATISTIK**

Urusan Statistik merupakan urusan yang dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas pokok fungsi menyiapkan data statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan. Setiap tahunnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung menyajikan Dokumen Statistik yang berisi data statistik Kabupaten badung yang bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan sesuai masa waktunya. Selain itu juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan.

- **URUSAN PERSANDIAN**

Urusan persandian berperan melakukan upaya melindungi keamanan informasi milik Pemerintah Kabupaten Badung, baik rahasia maupun terbuka, serta mendukung kegiatan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap ancaman yang timbul pada kepentingan dan keamanan Daerah.

1.4 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

Berdasarkan peraturan – peraturan tersebut diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut;

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang komunikasi dan Informatika.
2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali.

Fungsi :

1. Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
2. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Bali.
3. Melaksanakan pembinaan operasional berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Badung.

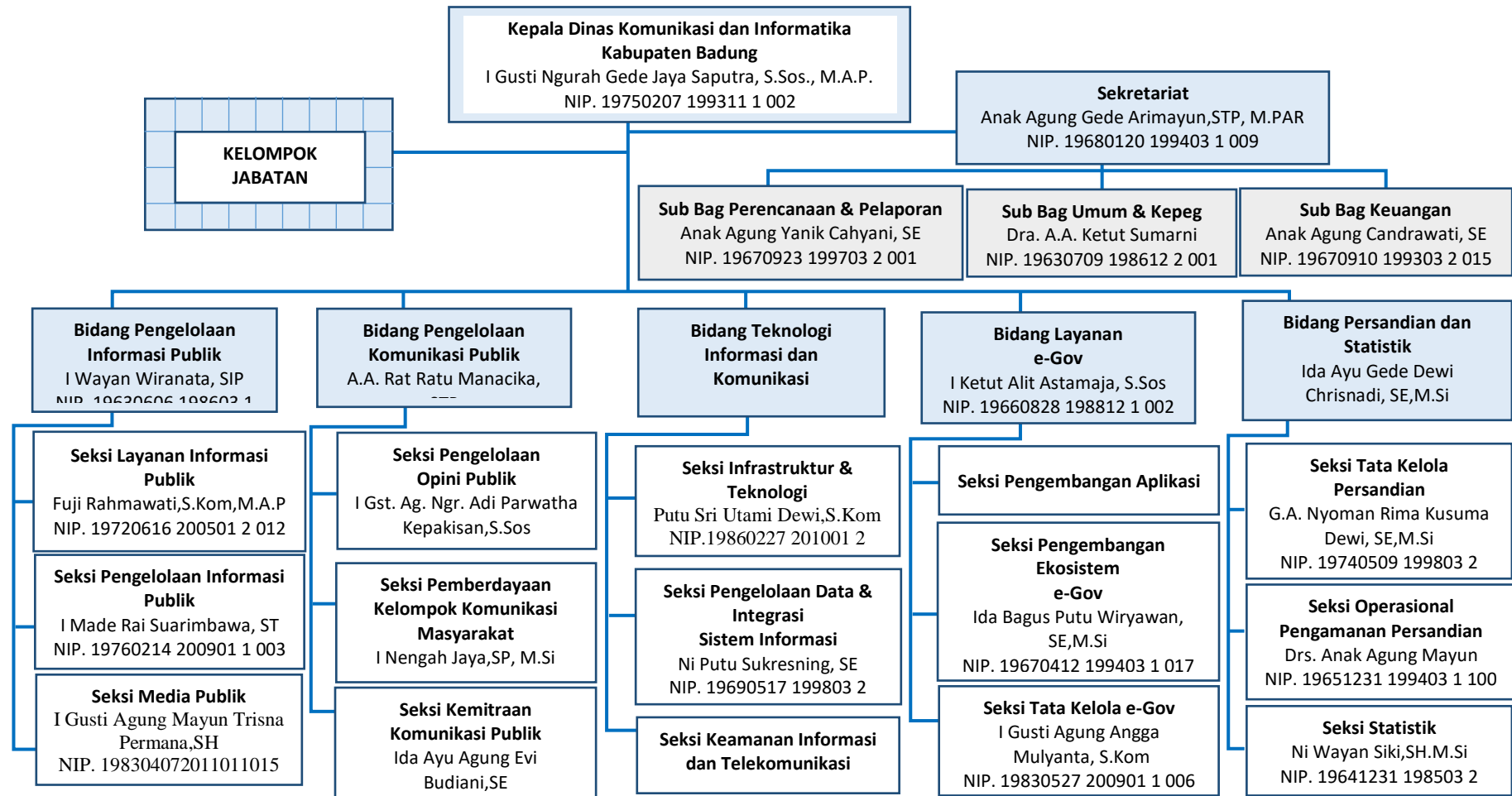
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dipimpin oleh Kepala Dinas dengan dibantu oleh satu orang Sekretaris Dinas dan 5 Kepala Bidang.

Adapun staf yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung seluruhnya berjumlah 138 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 53 orang dan kontrak sebanyak 85 orang termasuk 1 Orang sopir. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung secara jelas dapat dilihat pada gambar 1.1.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin terjadi.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya untuk menyelaraskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Badung, Dinas komunikasi dan Informatika berpedoman pada dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain : Renstra 2016 – 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan pertanggung jawaban terhadap keberhasilan / kegagalan atas target sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Untuk efektifitas pencapaian target sasaran kinerja, disusun prioritas kinerja berupa program yang memiliki daya dukung dengan capaian sasaran pembangunan daerah sebagai langkah strategik dalam suatu sistem dan proses penyelenggaraan pemerintah dalam menerapkan visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

2.1.1. Tujuan dan sasaran

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau di hasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Untuk mendukung terealisasinya pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Badung, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung perlu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk memberikan arah terhadap tujuan yang hendak dicapai.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan tertentu dengan target yang telah ditentukan. Dengan demikian tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran itu sendiri hendaknya mampu menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan / kegiatan yang bersifat spesifik, rinci dapat diukur (kuantitatif) dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya melaksanakan 3 (tiga) urusan dengan 4 (empat) tujuan , 4 (empat) sasaran dan 6 (enam) indikator. Keterkaitan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dengan visi dan misi Kabupaten Badung menyangkut urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Badung
(urusan komunikasi dan informatika)

Visi : Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera.	
Misi kedua : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.	
Tujuan :	Sasaran :
1. Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama.	1. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif.
Misi kedelapan : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumberdaya manusia dan infrastruktur wilayah	
2. Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama.	2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif.
Misi kesembilan : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya	
3. Terwujudnya Kelompok Komunikasi Informasi Masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi	3. Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung menetapkan strategi dan arah kebijakannya, seperti dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama.	Semakin meningkat nya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana teknologi informasi sesuai dengan perkembangan pertumbuhan masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi agar tepat guna dan efektif. 	Meningkat- kan pemanfaatan teknologi informasi agar tepat guna dan efektif.
Terwujudnya Kelompok Komunikasi Informasi Masyarakat berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya pemberdayaan Kelompok Masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkan akses pelayanan pada kelompok masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola jaringan pada kelompok masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 2. Meningkatkan sumberdaya dan sarana prasarana kelompok masyarakat berbasis TIK.

Terwujudnya ketersediaan dokumen statistik Kabupaten Badung yang akurat dan transparan	Terpublikasikan nya dokumen statistik Kabupaten Badung yang akurat dan transparan	Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait didalam pengumpulan data statistik yang akurat dan transparan	Meningkatkan kualitas dokumen statistik Kabupaten Badung dengan menyajikan data statistik yang akurat dan Transparan.
Terwujudnya tata kelola persandian dalam meningkatkan kerahasiaan dan keamanan informasi daerah sesuai peraturan perundang – undangan.	Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan dan sistem aplikasi khusus untuk mengamankan informasi dan komunikasi pimpinan di lingkungan Pemerintah Daerah	Mengatur tata kelola persandian, penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan sistem dan jaringan sandi, serta kualifikasi SDM sandi

2.2 Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung menetapkan Indikator Kinerja Utama pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
Tahun 2017-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3
1. Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama	1. Semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif.	1. Prosentase jenis pelayanan publik yang berbasis TIK. 2. Prosentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet / internet. 3. Jumlah kamera CCTV yang terpasang pada tempat – tempat strategis di Kabupaten Badung
2. Terwujudnya Kelompok Komunikasi Informasi Masyarakat berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	2. Meningkatnya pemberdayaan Kelompok Masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	4. Prosentase kelompok komunikasi informasi masyarakat yang terbentuk dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Terwujudnya ketersediaan dokumen statistik Kabupaten Badung yang akurat dan transparan	3. Terpublikasikannya dokumen statistik Kabupaten Badung yang akurat dan transparan	5. Jumlah dokumen statistik Kabupaten Badung yang dipublikasikan tepat waktu
4. Terwujudnya tata kelola persandian dalam meningkatkan kerahasiaan dan keamanan informasi daerah sesuai peraturan perundang – undangan.	4. Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah	6. Prosentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang - undangan

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam menyusun Perjanjian Kinerja, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang telah ditetapkan dan diintegrasikan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Badung
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkat nya pemanfaat- an teknologi informasi secara efektif	1. Prosentase jenis pelayanan publik yang berbasis TIK 2. Prosentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet 3. Jumlah kamera CCTV yang terpasang pada tempat – tempat strategis di kabuapten Badung	Persen Persen Kamera CCTV	91,6 100 656
2.	Meningkatnya pemberdayaan Kelompok Masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	4. Prosentase Kelompok Komunikasi Informasi Masyarakat yang terbentuk dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Persen	87,5
3.	Terwujudnya ketersediaan dokumen statistik Kabupaten Badung yang akurat dan transparan	5. Jumlah dokumen Statistik Kabupaten Badung yang dipublikasikan tepat waktu	Dokumen	750

4.	Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah	6. Prosentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaannya dan keamanannya sesuai perundang – undangan	Persen	100
----	---	--	--------	-----

2.4. Cascading Tahun 2020

Cascading memiliki makna sebuah proses dalam bentuk pohon kinerja yang berisikan tahapan – tahapan didalam mewujudkan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja. Cascading ini dibuat dari pucuk pimpinan sampai staf teknis sehingga memberikan kejelasan untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan dari pada masing – masing aparatur Kabupaten Badung.

Dengan disusunnya cascading di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, dapat diketahui kegagalan dan keberhasilan dalam pencapaian kinerja setiap level eselon.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung selaku pengemban amanah Kepala Daerah Kabupaten Badung melaksanakan kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang dilaksanakan.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2020 disusun berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tahun 2016-2021. Dengan disusunnya LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari kelompok indikator masing – masing urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yaitu urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan urusan Persandian.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tahun 2020, terdapat 4 (empat) sasaran serta 6 (enam) indikator yang dievaluasi dan dianalisis pencapaian kinerjanya untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tahun 2016-2021.

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tahun 2020 berdasarkan pengukurannya dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019				TAHUN 2020		
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif	1. Prosentase jenis pelayanan publik yang berbasis TIK	Persen	82	82	100	91,6	91,6	100
		2. Prosentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet	Persen	100	98,2	98,2	100	98,2	98,2
		3. Jumlah kamera cctv yang terpasang pada tempat - tempat strategis di Kabupaten Badung	Kamera CCTV	656	647	98,6	656	647	98,63
2	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	4. Prosentase Kelompok Komunikasi Informasi Masyarakat yang terbentuk dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Persen	75	150	200	87,5	162,5	185,7

3	Terpublikasikannya dokumen statistik Kabupaten Badung yang akurat dan transparan	5. Jumlah dokumen statistik yang dipublikasikan tepat waktu	Dokumen	750	425	56,7	750	3	0,4
4	Meningkatnya tatakelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah	6. Prosentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang - undangan	Persen	100	100	100	100	50	50

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian tujuan yang dijabarkan dalam keberhasilan dari sasaran berdasarkan indikator kinerja yang mendukung. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan, berupa dokumen Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tahun 2016 – 2021.

Sehingga analisis atas capaian kinerja ini menyajikan capaian tujuan yang ingin dicapai sesuai yang diperjanjikan melalui Perjanjian kinerja 2020 sesuai hasil pengukuran kinerja dengan rencana akhir yang ingin dicapai berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020.

Hasil analisis tujuan, sasaran dan indikator sasaran urusan komunikasi dan informatika secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1: Semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif.
--

Sasaran 1 yaitu Semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif terdiri dari 3 (tiga) alat ukur yaitu indikator Prosentase jenis pelayanan publik yang berbasis TIK, Prosentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet dan indikator jumlah kamera CCTV yang terpasang pada tempat strategis di kabupaten Badung.

Untuk pencapaian kedua indikator ini, dapat dijelaskan pada pengukuran dan analisis sebagaimana pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Secara Efektif.

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	7	8	9	10	11	12
1	Prosentase jenis pelayanan publik berbasis TIK	82	82	100	91,6	91,6	100
2	Prosentase lokasi yang jaringan intranet/internet	100	98,2	98,2	100	98,2	98,2
2	Jumlah kamera CCTV yang terpasang pada tempat – tempat strategis	656	647	98,6	656	647	98,63

• **Indikator 1 :**
Prosentase jenis pelayanan publik berbasis TIK



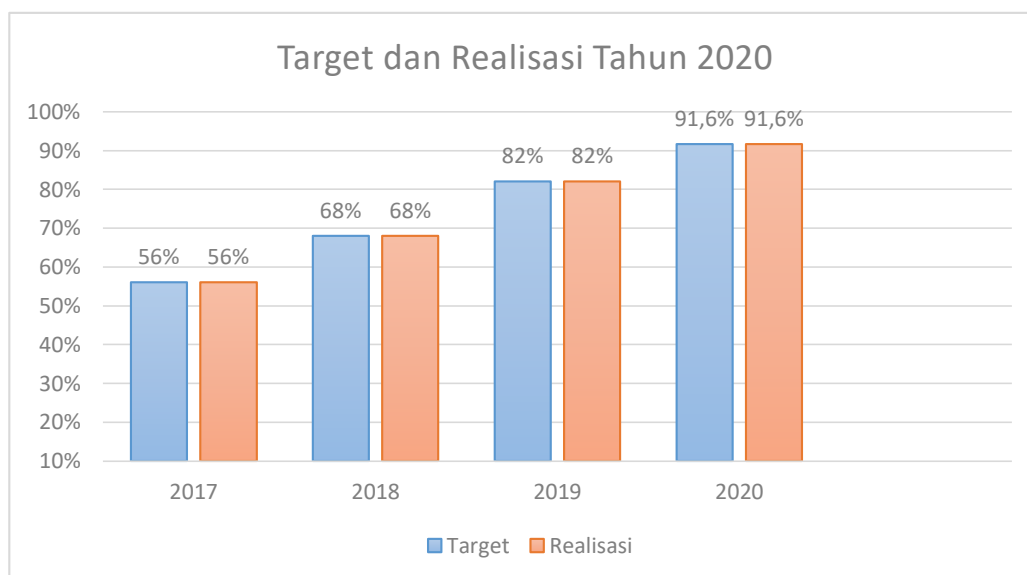
Pemerintahan elektronik atau e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis serta hal - hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Keuntungan yang paling diharapkan dari e-Government adalah

peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Untuk meningkatkan kualitas Sistem informasi dalam mendukung perbaikan kualitas pelayanan publik, Dinas Kominfo menyiapkan 72 jenis layanan aplikasi pelayanan publik, berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui tahun 2019 persentase aplikasi yang dimanfaatkan sebesar 82 % atau 59 aplikasi dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 91,6 % atau telah dibangun 7 sistem jenis layanan aplikasi dari target 5 yang ditargetkan. jadi sampai dengan tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika telah membangun 66 layanan aplikasi terintegrasi terkait pelayanan publik dengan capaian

kinerja 100%. Dibandingkan dengan tahun 2019 Layanan aplikasi terintegrasi terkait pelayanan publik tahun 2020 telah meningkat sebesar 10,61 % . Pada triwulan I di bangun Sistem Informasi Penyebaran Covid Kabupaten Badung, triwulan II dibangun Sistem PPDB dan Sistem Pengujian Kendaraan Bermotor. Pada triwulan III dibangun Sistem digital Singnatur dan Sistem Tracing Covid, dan pada triwulan IV dibangun Sistem Portal Website Badung.

Perbandingan realisasi indikator prosentase peningkatan jumlah jenis pelayanan publik berbasis TIK tahun 2017-2020 seperti pada grafik 3.1 berikut :

Grafik 3.1
Target Dan Realisasi Indikator Kinerja
Prosentase Jenis Pelayanan Publik Berbasis TIK



Target jangka menengah dalam Renstra adalah 72 jenis aplikasi pelayanan publik di kabupaten Badung 100 % sudah berbasis TIK. Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sudah terbangun 66 aplikasi (91,6%) sesuai target yang telah ditetapkan di dalam Renstra.

Target jumlah layanan publik berbasis TIK dalam 5 tahun (2016-2021) seperti dalam tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Target Jumlah Aplikasi Layanan Publik Berbasis TIK
Tahun 2016 s/d 2021

No.	Tahun	Total target	Prosentase
1.	2016	34 aplikasi	47,2%
2.	2017	40 aplikasi	55,6%
3.	2018	49 aplikasi	68%
4.	2019	59 aplikasi	82%
5.	2020	66 aplikasi	91,6%
6.	2021	72 aplikasi	100%

Indikator kinerja prosentase jenis pelayanan publik berbasis TIK di dukung 1 (Satu) program dan 6 (Enam) kegiatan yaitu program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa, dengan anggaran Rp 12.785.256.323,- realisasi anggaran Rp 12.571.671.584,- Dari perbandingan pagu anggaran dengan realisasi anggaran terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 213.584.739,- efisiensi ini akibat adanya efisiensi dari belanja ATK, dan penyesuaian belanja bahan bakar minyak.

Kegiatan pendukung program tersebut adalah kegiatan Pemeliharaan web Kabupaten Badung. Situs Website Kabupaten Badung www.badungkab.go.id telah dibuat sejak tahun 2011 ketika urusan Kominfo masih bergabung dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang merupakan salah satu infrastruktur utama pelayanan publik untuk menyamaratakan kemudahan dan kecepatan pelayanan publik dalam rangka memberikan informasi dan sosialisasi pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, kegiatan Penerapan Teknologi Informasi dan komunikasi di Kabupaten Badung dibutuhkan guna penyiapan / pembangunan aplikasi untuk mendukung pelayanan berbasis TIK bagi masyarakat dengan memanfaatkan tenaga ahli TIK. Kegiatan lain yang mendukung indikator tersebut adalah Pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung, kegiatan Optimalisasi pengembangan dan penerapan Smart City di Kabupaten Badung, Kegiatan Pengelolaan Pusat kendali Kabupaten Badung, dan kegiatan Pengadaan perangkat Manajemen Bandwidth dan Security, kegiatan – kegiatan tersebut sangat

penting karena memungkinkan pemerintah mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan yang berkepentingan sesuai dengan tujuan utama dari E-Government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

- **Indikator 2 :**
Prosentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet / internet.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah digunakan di berbagai kehidupan masyarakat untuk membantu meningkatkan kinerja mereka. Tuntutan penggunaan TIK di lingkungan instansi pemerintah untuk menyelesaikan tugas – tugas internal dan memberikan layanan masyarakatpun semakin besar. Karena dengan mengoptimalkan TIK ekspektasi masyarakat terhadap kinerja dan layanan pemerintah yang lebih baik, akuntabel dan transparan bisa terwujud, sehingga tatakelola pemerintahan yang baik atau “ good governance” bisa direalisasikan.

Tahun 2020 Dinas Komunikasi Dan Informatika tidak mengembangkan lokasi pemasangan infrastruktur intranet/internet dan akan dilanjutkan pada tahun 2021 sehingga target tercapai 100 %, akan tetapi pengembangan akses internet di Kabupaten Badung memprioritaskan pada meningkatkan jangkauan sinyal wifi sehingga pemancaran sinyal bisa merata pada lokasi yang sudah terhubung jaringan internet dengan cara menambah akses point pada lokasi - lokasi tersebut. Dengan demikian proses tatakelola pemerintahan serta keterbukaan informasi didalam pemberian pelayanan publik semakin meningkat dan berkualitas. Pengembangan Akses Internet di Kabupaten Badung pada tahun 2020 dipusatkan pada 1 (Satu) lokasi yaitu di Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Badung.

Adapun pengembangan penambahan Akses Poin (AP) pada tahun 2020 ditargetkan 518 AP dan realisasi sebanyak 534 AP, terjadi peningkatan dari target sebanyak 16 AP (103,09 %). Total akses poin yg dikembangkan pada tahun 2019 sebanyak 1101 AP dan penambahan tahun 2020 sebanyak 534 AP terpasang di seluruh ruang tempat kerja dan ruang rapat, sehingga tota pengembangan akses poin sampai tahun 2020 sebanyak 1635 AP. Jumlah akses point yang dibangun pada lokasi lokasi terkoneksi jaringan intranet/internet tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut:

TABEL 3.4

**Pengembangan Akses Point pada lokasi – lokasi yang terkoneksi jaringan
intranet/internet tahun 2019 – 2020**

NO	LOKASI	AKSES POINT	
		2019	2020
1	Kantor Camat	24	
2	Kelurahan dan Desa	124	
3	SD N	249	
4	SMP N	22	
5	Puskesmas dan Pustu	67	
6	Lingkungan dan Banjar	548	
7	Obyek Wisata	33	
8	Puspem	34	534
	SUB TOTAL	1101	534
TOTAL 2019 - 2020		1635	

Adapun Indikator Prosentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di dukung oleh 1 (satu) program dan 2 (Dua) kegiatan yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa dengan anggaran sebesar 44.769.554.740,- realisasi 44.387.683.920,01. Dari perbandingan pagu anggaran dengan realisasi anggaran terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 381.870.819,99 efisiensi ini akibat adanya efisiensi dari belanja ATK, penyesuaian belanja bahan bakar minyak dan adanya penyesuaian harga dari rekanan. Dua kegiatan pendukungnya adalah kegiatan pengembangan penyediaan akses internet di Kabupaten Badung dan kegiatan Pemeliharaan infratraktur jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung.

- **Indikator 3 :
Jumlah Kamera CCTV yang terpasang pada tempat – tempat strategis di Kabupaten Badung**



CCTV merupakan sebuah sistem pengawasan terpadu dengan memanfaatkan kamera untuk media input data (melihat) dan DVR untuk merekam serta komponen lain sebagai pendukung. Sebagai daerah destinasi pariwisata internasional, sangatlah penting bagi Pemerintah Kabupaten Badung untuk memasang alat pantau keamanan berupa kamera

CCTV pada kawasan strategis di wilayah Kabupaten Badung. Berdasarkan tabel 3.2, target indikator jumlah kamera CCTV yang terpasang pada tempat – tempat strategis di Kabupaten Badung sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 647 kamera CCTV, dimana target dalam RPJMD 2017 – 2021 sebanyak 656 kamera CCTV, sehingga target tercapai 100 %.

Pada tahun 2020 untuk kegiatan pengembangan pengadaan dan pemasangan jaringan CCTV pada kawasan strategis di Kabupaten Badung tidak dilaksanakan karena adanya refofusing terhadap belanja modal akibat konsentrasi anggaran di utamakan pada penanganan bencana Covid-19. Namun untuk tahun anggaran 2020 lebih memprioritaskan pada kegiatan pemeliharaan CCTV guna meningkatkan kualitas pelayanan keamanan terhadap masyarakat. Kegiatan tersebut akan dianggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran Perubahan 2021, sehingga target RPJMD dapat tercapai.

Kegiatan pemeliharaan CCTV di Kabupaten Badung merupakan salah satu kegiatan pendukung dari indikator jumlah kamera CCTV yang terpasang pada tempat – tempat strategis di Kabupaten Badung. Dimana pemeliharaannya tidak hanya pada kamera (Alat lihat) namun juga dilakukan pemeliharaan terhadap DVR yaitu alat rekam serta komponen lainnya, sehingga alat pantau keamanan dapat berfungsi secara optimal. Dari data pengadaan CCTV dari tahun 2017 sampai 2020 sebanyak 647 kamera, tersebar pada 118 (Seratus delapan belas) lokasi yaitu di Kecamatan Kuta 79 lokasi, Kecamatan Kuta Utara 37 lokasi, Puspem Badung 1 lokasi dan RSUD Mangusada 1 lokasi. Dengan rincian

kondisi 521 kamera dalam kondisi baik, 64 kamera dalam kondisi baik namun masih dalam pemeliharaan rekanan, 45 kamera rusak ringan dan 17 kamera dalam kondisi Rusak berat dan sedang dihusulkan untuk proses penghapusan.

TABEL 3.5

Pengembangan Lokasi dan Jumlah Kamera CCTV dari Tahun 2017 -2020

NO	TAHUN	JARINGAN CCTV		KONDISI		
		LOKASI	KAMERA	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	2017	80	183	137	30	16
2	2018	38	400	384	15	1
3	2019		64	64		
4	2020					
TOTAL		118	647	585	45	17

Analisis penyebab realisasi tidak mencapai target disebabkan karena adanya refofusing anggaran pada Tahun 2020 akibat adanya bencana Pandemi Covid 19 yang menyebabkan penundaan atas pengadaan dan pengembangan kamera CCTV di tempat – tempat strategis di Kabupaten Badung sehingga hanya memprioritaskan pada pemeliharaan Kamera CCTV dan Kelengkapan lainnya demi terjaganya keamanan dan kenyamanan pada kawasan strategis di Kabupaten Badung. Adapun Kamera yang terpelihara pada tahun 2020 yaitu 178 kamera(31,45 %) dari 566 kamera yang ditargetkan untuk dipelihara.

Indikator kinerja Jumlah kamera CCTV yang terpasang pada kawasan strategis di dukung 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa dan 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan pemeliharaan CCTV dan Kegiatan Pengadaan dan Pengembangan CCTV di Kabupaten Badung, dengan anggaran Rp 1.076.537.800,- realisasi anggaran sebesar Rp 948.603.005,- efisiensi sebesar 127.934.795,- efisiensi tersebut disebabkan karena pada kegiatan Pemeliharaan CCTV di Kabupaten Badung CCTV yang terpasang masih berfungsi baik sehingga ada efisiensi terhadap biaya pemeliharaan CCTV, adanya efisiensi terhadap Belanja makan minum rapat dan biaya pemeliharaan CCTV. Sedangkan pada kegiatan Pengembangan pengadaan dan pemasangan jaringan CCTV atas Belanja alat tulis kantor dan belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat batu keamanan.

Sasaran 2:
Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Sasaran 2 yaitu meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan alat ukur 1 (satu) indikator yaitu Prosentase Kelompok Komunikasi Informasi Masyarakat yang terbentuk dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk pencapaian indikator ini, dapat dijelaskan pada pengukuran dan analisis sebagaimana pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja 2020
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	7	8	9	10	11	12
1	Prosentase Kelompok Komunikasi Informasi Masyarakat yang terbentuk dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	75 %	150 %	200 %	87,5 %	162,5 %	185,71 %

• **Indikator 4 :**

Prosentase Kelompok Komunikasi Informasi Masyarakat yang terbentuk dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi



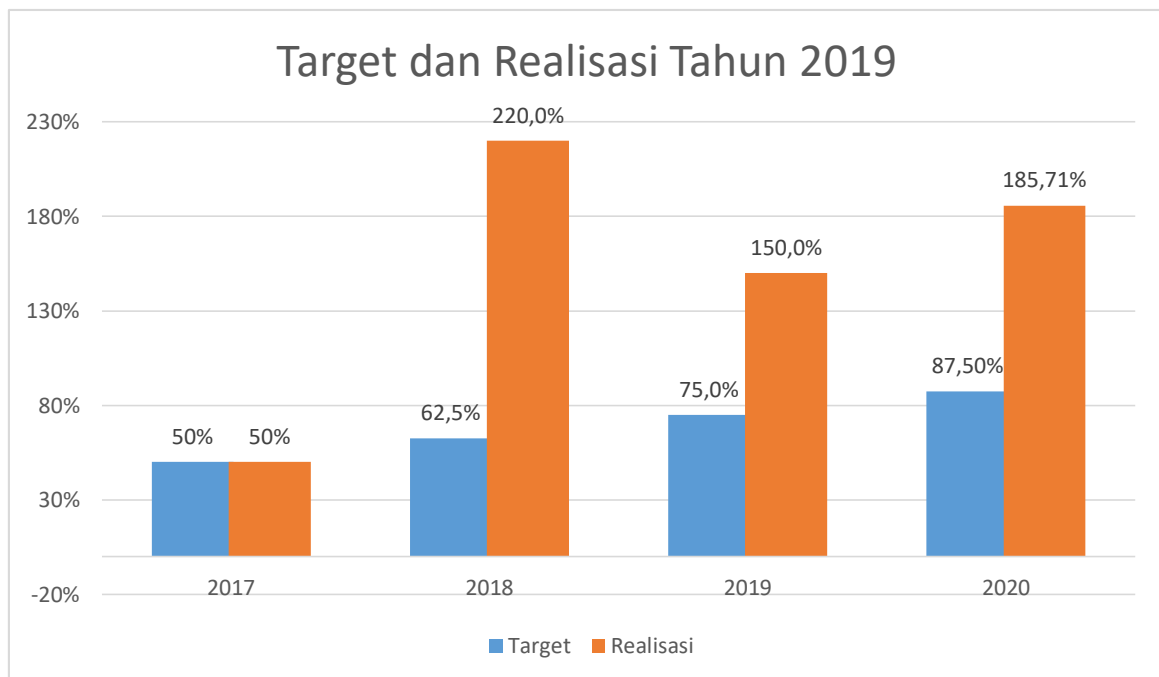
Upaya pemberdayaan kehidupan masyarakat Kabupaten Badung di era globalisasi dimana persaingan semakin terbuka di dalam dan di luar negeri. Upaya pemberdayaan antara lain dilakukan dengan mendorong kelompok - kelompok masyarakat untuk mendayagunakan teknologi didalam penyebaran informasi agar memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat. Proses pemberdayaan terjadi melalui peningkatan kesadaran akan pentingnya informasi, peningkatan akses dan pendayagunaan melalui kelompok.

Kelompok Komunikasi Informasi Masyarakat (KKIM) adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Di Kabuapten Badung awal pembentukan Kelompok KIM dilaksakan dengan menunjuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/11 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota. Atas kebijakan Bupati Badung dengan berdasarkan Permen. Kominfo no 8/Per/M/Kominfo/6/2010 terbit Surat Edaran Bupati Badung Nomor 411.6/758/DISKOMINFO/SEKRET yang meminta setiap Desa/Kelurahan untuk membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Pembentukan KIM yang awalnya hanya di Kecamatan menjadi di setiap desa/kelurahan mengakibatkan capaian kinerja Kinerjanya sangat tinggi dikarenakan realisasinya melampaui target dengan sangat signifikan dari target 5 tahun yang ditetapkan yaitu 24 Kelompok Informasi Komunikasi (KIM). dapat dilihat pada tabel 3.6 tahun 2020 pembetulan KKIM di Kabupaten Badung ditargetkan sebesar 87,5 % atau tersedia 21 kelompok dari rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016 – 2021 yaitu tersedia 24 kelompok di akhir periode (2021) dengan terbentuknya 3 kelompok KIM tahun 2020 maka realisasinya sebesar 162,5% atau tersedia 39 kelompok dengan capaian kinerja sebesar 185,71%. Dibandingkan dengan tahun 2019 target terbentuknya Kelompok KIM

adalah 75% atau tersedia 36 kelompok KIM , meningkat sebanyak 3 kelompok realisasinya sebesar 150% dengan capaian 266,67%. Sebagai gambaran perbandingan target dan realisasi tahun 2017 dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik 3.4 dibawah ini :

Grafik 3.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Prosentase Kelompok Komunikasi Informasi Masyarakat Yang Terbentuk dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi



Pencapaian realisasi yang melebihi target yang ditetapkan karena respon terhadap kehadiran KIM cukup besar , terutama dari aparat Desa/Kelurahan yang membutuhkan wahana penyaluran dan pendayagunaan informasi melalui kelompok informasi yang dibentuk. untuk meningkatkan potensi sumberdaya informasi dalam masyarakat yang belum terolah dan belum termanfaatkan secara optimal. Desa/Kelurahan di Kecamatan yang telah membentuk KIM tahun 2017 s/d 2020 seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Desa/Kelurahan di Kecamatan yang telah membentuk KIM tahun 2017 s/d 2020

No	Kecamatan	Tahun 2017 s/d 2019		Tahun 2020	
		Desa/ Kelurahan	Nama Kelompok KIM	Desa/ Kelurahan	Nama Kelompok KIM
1.	PETANG	1. Plaga	Plagaku		
		2. Pangsari	Karang Taruna Catur Buana		
		3. Belok Sidan	KIM Belok Sidan		
		4. Petang	KIM Desa Petang		
		5. Desa Carangsari	KIM Desa Carangsari		
2.	ABIANSEMAL	6. Jagapati	Satya Nugraha		
		7. Taman	Sekaa Udayana- Net		
		8. Abiansemal	KIM Desa Abiansemal		
		9. Blahkiuh	KIM Desa Blahkiuh		
		10. Mambal	Desa Mambal		

		11. Punggul	KIM Desa Punggul		
		12. Sangeh	KIM Desa Sangeh		
		13. Sedang	KIM Desa Sedang		
		14. Selat	KIM Desa Selat		
		15. Sibang gede	KIM Desa Sibanggede		
		16. Bongkasa	KIM Desa Bongkasa		
		17. Mekar Bhuana	KIM Desa Mekar Bhuana		
3.	MENGWI	18.Mengwitani 1	Karang Taruna Tanjung Mekar Sari	1. Kapal	KIM Kapal
		19.Sempidi	Hanoman Web	2. Gulingan	KIM Gulingan
		20.Mengwitani 2	Braya Angsa Empas		
		21. Buduk	KIM Desa Buduk		
		22. Cemagi	KIM Desa Cemagi		
		23. Kekeran	KIM Desa Kekeran		
		24.Mengwi	KIM Desa Mengwi		
		25.Munggu	KIM Desa		

			Munggu		
		26. Penarungan	KIM Desa Penarungan		
		27. Werdi Bhuwana	KIM Desa Werdi Bhuwana		
		28. Buduk	KIM Desa Buduk		
4.	KUTA UTARA	29. Canggu	KIM Desa Canggu	3. Kelurahan Kerobokan Kaje	KIK Kerobokan Kaje
		30. Tibubeneng	KIM Desa Tibubeneng		
		31. Desa Dalung	KIM Desa Dalung		
5.	KUTA	32. Legian	SMILE		
		33. Kutuh	Kemdes Kutuh		
		34. Seminyak	Seweka Mediatama		
6.	KUTA SELATAN	35. Ungasan	Repiter Maruti		
		36. Desa Pecatu	KIM Desa Pecatu		

Adapun indikator Prosentase Kelompok Komunikasi Informasi Masyarakat yang terbentuk dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi didukung oleh 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan yaitu Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media masa dan Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dalam Penyerapan Informasi Media dengan pagu sebesar Rp 18.298.500,- terealisasi Rp 12.930.300,- dengan demikian ada efisiensi sebesar Rp 5.368.200,- yang bersumber dari efisiensi anggaran atas kegiatan pendukungnya yaitu Kegiatan Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Komunikasi dan Informasi Masyarakat (KKIM) berbasis WEB (TI). Kegiatan Literasi Media. Dan Kegiatan Informasi Publik dan Dokumentasi.

Sasaran 3 :
Terpublikasikannya dokumen statistik Kabupaten Badung yang akurat dan transparan

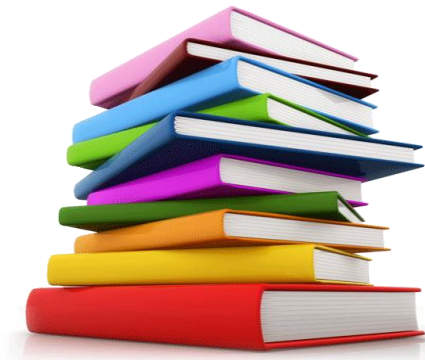
Sasaran 3 yaitu terpublikasikannya dokumen statistik Kabupaten Badung yang akurat dan transparan, sasaran tersebut merupakan sasaran dari salah satu urusan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Badung yaitu urusan Statistik dengan alat ukur 1 (satu) indikator yaitu jumlah dokumen statistik Kabupaten Badung yang dipublikasikan tepat waktu.

Untuk pencapaian indikator ini, dapat dijelaskan pada pengukuran dan analisis sebagaimana pada tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Terpublikasikannya Dokumen Statistik Kabupaten Badung Yang Akurat dan Transparan.

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah dokumen statistik Kabupaten Badung yang dipublikasikan tepat waktu\	750 dokumen	425 dokumen	56,7 %	750 dokumen	3 dokumen	0,4 %

• **Indikator 5 :**
**Jumlah dokumen statistik Kabupaten Badung yang
dipublikasikan tepat waktu**



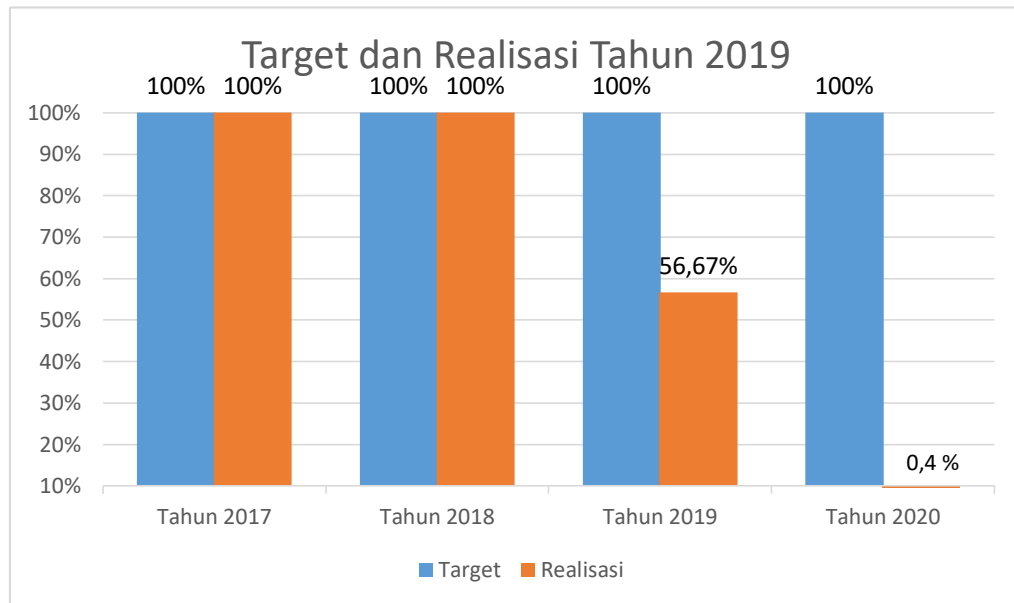
Publikasi data statistik sebagai wujud terselenggaranya pembangunan yang lebih terencana, oleh karenanya ketersediaan data statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Berdasarkan tabel 3.8 realisasi jumlah dokumen statistik Kabupaten Badung yang dipublikasikan tepat waktu dalam bentuk buku tidak

dilaksanakan Tahun 2020 ini karena adanya refofusing anggaran penggandaan dokumen akibat dari pandemi Covid-19. Namun kegiatan penyusunan dokumen tetap dilakukan dalam bentuk softcopy dan dipublikasikan lewat Website PPID yaitu ppid.badungkab.go.id, dimana PPID sudah terbentuk di setiap Perangkat daerah termasuk Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung. Penyusunan 3 jenis dokumen tersebut dapat diselesaikan 100% dengan adanya kerjasama dengan Badan Statistik Daerah untuk mendapatkan data – data statistik yang andal, akurat dan transparan. Dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020 yaitu 227 data terealisasi 100%, dimana ke 227 data tersebut dituangkan dalam ke 3 jenis dokumen yang disusun. Adapun ke tiga jenis dokumen tersebut adalah :

1. Badung Dalam Angka
2. Kecamatan Dalam Angka (terdiri atas 6 dokumen)
3. PDRB

Perogram yang menunjang tercapainya capaian kinerja sasaran adalah Program Pengembangan Data / Informasi /Statistik Daerah dengan Pagu sebesar Rp 8.447.200,- terealisasi Rp 8.326.300,- dengan demikian ada efisiensi sebesar Rp 120.900,-. Adapun kegiatan pendukungnya yaitu Kegiatan Penggandaan Data Sektoral Statistik, Kegiatan Forum Data Statistik Kabupaten Badung dan Kegiatan Sosialisasi Simdasi Pemerintah kabupaten Badung.

Grafik 3.3
Target Dan Realisasi Indikator Jumlah Dokumen Statistik Kabupaten Badung yang di publikasikan tepat waktu.



Sasaran 4 :
Meningkatnya tatakelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah.

Dengan masuknya urusan persandian sebagai salah satu urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung maka penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Sebagai alat ukur capaian kinerja sasaran adalah indikator Prosentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang-undangan.

Capaian kinerja indikator pendukung sasaran ini, dapat dijelaskan pada pengukuran dan analisis sebagaimana pada tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9

Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatkan Tatakelola Persandian Untuk Menjaga Kerahasiaan Serta Keamanan Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	7	8	9	10	11	12
1	Prosentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai per undang - undangan	100 %	100 %	100	100 %	50 %	50

**• Indikator 6 :
Prosentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang - undangan**



Penyelenggaraan urusan persandian menyangkut pengamanan informasi publik; bukan hanya jaminan keamanan terhadap aspek kerahasiaan tetapi terhadap aspek keutuhan, keotentikan dan nir penyangkalan; pelayanan kepada pimpinan daerah dan perangkat daerah termasuk staf; pengamanan bukan hanya di kamar sandi; tetapi juga mendukung pengamanan TIK; kolaborasi dengan sistem keamanan informasi.

Berdasarkan tabel 3.9 target dari indikator prosentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan pengamanannya sesuai perundang - undangan tahun 2020 sebesar 100% realisasi 50 % dengan capaian kinerja 50% menurun dari tahun 2019 dengan realisasi 100%. Hal ini disebabkan karena adanya refofusing anggaran dan adanya pembatasan pada perjalanan dinas ke luar daerah akibat pandemi covid 19 sehingga tidak bisa dilaksanakan koordinasi dan pengambilan alat sandi di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Namun pengamanan informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan pengamanan sesuai perundang – undangan untuk tahun 2020 dilakukan melalui aplikasi Sertifikat Elektronik. Dengan adanya aplikasi Sertifikat Elektronik, semua informasi/konten dapat

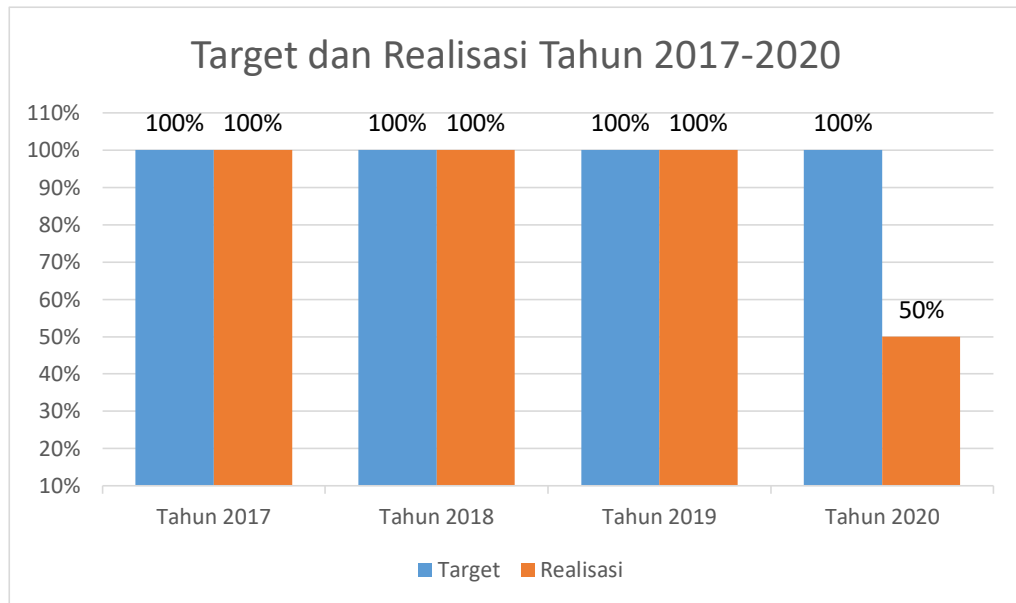
diamankan melalui Badung Digital Signature yang sudah di sah kan oleh BSSN. Dan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Badung sudah menggunakan aplikasi tersebut. Adapaun jenis informasi yang wajib diamankan dalam Persandian Daerah Kabupaten Badung yaitu :

1. Jumlah informasi/konten yang diamankan;
2. Jumlah aset alat vital yang diamankan;
3. Jumlah pengamanan pelaksanaan kegiatan penting;
4. Jumlah Perangkat daerah (PD) yang menggunakan fasilitas persandian.

Dari empat jenis informasi yang wajib diamankan dalam persandian daerah Kabupaten Badung, hanya dua yang dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu Jumlah informasi/konten yang diamankan dan Jumlah Perangkat daerah (PD) yang menggunakan fasilitas persandian. Sedangkan untuk Jumlah aset alat vital yang diamankan dan Jumlah pengamanan pelaksanaan kegiatan penting di tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena perjalanan dinas dalam rangka peminjaman alat utk pengamanan ke BSSN Jakarta tidak diperbolehkan akibat pandemi covid-19, sehingga dua jenis informasi yang wajib diamankan sesuai peraturan perundang – undang tidak dapat dilaksanakan.

Jadi prosentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan pengamanannya sesuai perundang - undangan tahun 2020 yaitu 50 %, menurun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.6 tentang gambaran prosentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan pengamanannya sesuai perundang – undangan dari tahun 2017 sampai dengan 2020.

Grafik 3.4
Prosentase Informasi Daerah yang Terjaga Kerahasiaan dan Keamanannya sesuai Perundang-undangan

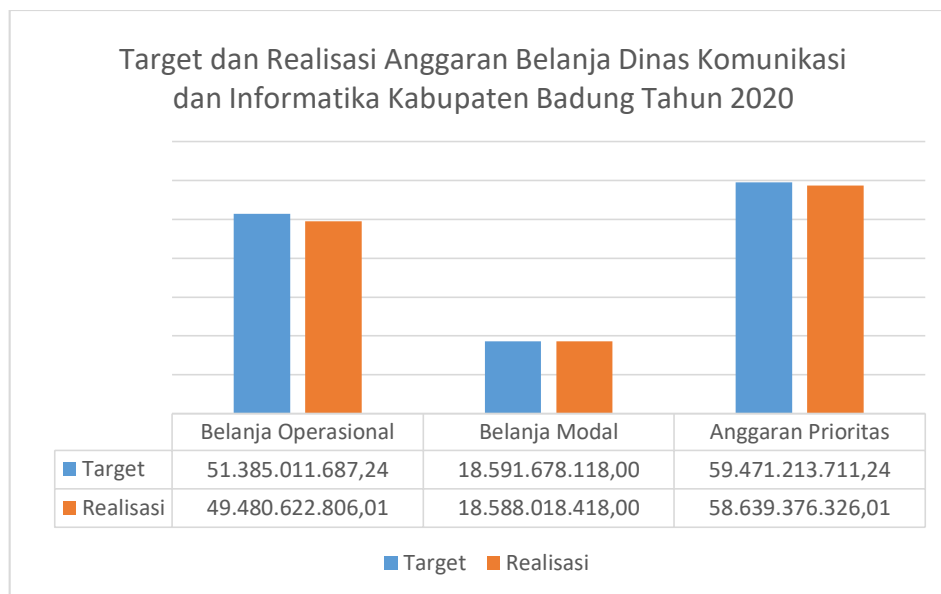


Tercapainya target sasaran kinerja sebesar 50 % dalam keterbatasan anggaran dalam situasi pandemi covid-19 ini disebabkan karena urusan persandian memiliki tenaga SDM yang bersertifikasi persandian dan mendapatkan pelatihan penggunaan peralatan persandian, terlaksananya koordinasi yang dengan Badan Siber dan Sandi Negara secara rutin di tahun – tahun sebelumnya disamping itu Dinas Kominfo juga telah memiliki tenaga analis dan programmer yang mampu membuat aplikasi e-surat yang diintegrasikan dengan Sertifikat Elektronik yang dapat dipergunakan untuk pengamanan informasi dan sudah digunakan oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Badung. Adapun program yang menunjang tercapainya capaian kinerja sasaran adalah Program Pengelolaan Persandian Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 52.477.000,- terealisasi 52.157.000,- dengan efisiensi sebesar Rp. 321.000,-. Dengan kegiatan pendukung yaitu kegiatan pengelolaan teknis persandian, kegiatan pengelolaan pengamanan informasi, peralatan sandi dan jaringan komunikasi sandi, kegiatan kontra pengindraan/sterilisasi terhadap ruang kerja pimpinan, rumah jabatan dan tempat kerja lainnya dan kegiatan sertifikat elektronik.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Alokasi Anggaran Tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang bersumber dari APBD sebesar Rp 69.976.689.805,24,- dengan realisasi sebesar Rp. 68.068.641.224,01,-. Adapun alokasi Belanja Operasional Rp. 51.385.011.687,24,- Realisasi sebesar Rp. 49.480.622.806,01,- dan Belanja Modal Rp. 18.591.678.118,- Realisasi sebesar Rp. 18.588.018.418,- Alokasi anggaran prioritas untuk pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 59.471.213.711,24,- dengan realisasi sebesar Rp 58.639.376.326,01,- Dan Target Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp.120.990.000,- Realisasi Rp. 132.108.000,-

Grafik 3.5
Target dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung



Pagu dan realisasi anggaran belanja daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tahun 2020 dan alokasi anggaran dan realisasi dari masing- masing

program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2020 sebagaimana tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.10

Alokasi Anggaran Dan Realisasi Program Serta Kegiatan Pendukung Capaian

Sasaran Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Jumlah kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif	Prosentase jenis pelayanan publik berbasis TIK	Persen	91,6	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	6 kegiatan	12.785.256.323,-	12.571.671.584,-
2.		Prosentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/ internet	Persen	100	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	2 kegiatan	44.769.554.740,-	44.387.683.920,01
		Jumlah kamera CCTV yang terpasang pada tempat – tempat strategis di Kabupaten Badung	Kamera CCTV	656	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	2 kegiatan	1.076.537.800,-	948.603.005,-
2	Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Prosentase Kelompok Komunikasi Informasi Masyarakat yang terbentuk dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Persen	87,5	-Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa. -Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dalam Penyerapan Informasi media	3 kegiatan	18.298.500,-	12.930.300,-
3	Terpublikasikannya dokumen statistik Kabupaten Badung yang akurat dan transparan	Jumlah dokumen statistik Kabupaten Badung	Dokumen	750	Program Pengembangan data/Informasi/ Statistik Daerah	3 kegiatan	8.447.200,-	8.326.300,-
4	Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah	Porsentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang – undangan	%	100%	Program Pengelolaan Teknis Persandian Daerah	4 kegiatan	52.477.000,-	52.157.000,-

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan transparansi sebagai nafas setiap gerak dan aktivitas pembangunan dalam upaya menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

I. Dilihat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas , Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1. Semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif	1. Prosentase jenis pelayanan publik yang berbasis TIK	91,6 %	91,6 %	100 %
	2. Prosentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet	100 %	98,2 %	98,2 %
	3. Kamera CCTV yang terpasang pada tempat – tempat strategis di Kabupaten Badung	656 Kamera CCTV	647 Kamera CCTV	98,63 %

2. Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	4. Prosentase Keompok Komunikasi Informasi Masyarakat yang terbentuk dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	87,5 %	162,5%	185,71 %
3. Terpublikasikannya dokumen statistik Kabupaten Badung yang akurat dan transparan	4. Jumlah dokumen statistik Kabupaten Badung yang di publikasikan tepat waktu	750 Dokumen	3 Dokumen	0,4 %
4. Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah	5. Prosentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang - undangan	100%	50 %	50 %

- II.** Alokasi Anggaran Tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang bersumber dari APBD sebesar Rp 69.976.689.805,24,- dengan realisasi sebesar Rp. 68.068.641.224,01,-. Adapun alokasi Belanja Operasional Rp. 51.385.011.687,24,- Realisasi sebesar Rp. 49.480.622.806,01,-. dan Belanja Modal Rp. 18.591.678.118,- Realisasi sebesar Rp. 18.588.018.418,- Alokasi anggaran prioritas untuk pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 59.471.213.711,24,- dengan realisasi sebesar Rp 58.639.376.326,01,- Dan Target Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp.120.990.000,- Realisasi Rp. 132.108.000,-.

III. 4.2 SARAN

Dengan Laporan Akuntabilitas ini maka dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan berkaitan dengan urusan komunikasi dan Informatika pada Dinas , Komunikasi dan Informatika di wilayah Kabupaten Badung. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang baru terbentuk tahun 2017 perlu membuat program dan kegiatan untuk mendukung kinerja yang lebih baik. Akhirnya kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada kita.

Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Badung,

I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, S.Sos.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750207199311 1 002